Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Nasib Lelang ERP Tunggu Kejaksaan

JAKARTA – Lelang *electronic road pricing* (ERP) di DKI Jakarta terganggu. Ketika berbagai kalangan menanti realisasi kebijakan jalan berbayar secara elektronik itu, dua dari tiga perusahaan yang mengikuti lelang malah mengundurkan diri.

> *"Kami masih tunggu fatwa Kejaksaan Agung. Kira-kira ya kalau enggak ada masalah, mengundurkan diri enggak? Karena itu, saya bilang begitu, nanti lihat prosesnya harus cek ke kejaksaan."*
>
> **ANIES BASWEDAN**
> Gubernur DKI Jakarta

Mundurnya dua perusahaan peserta lelang ERP, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, gambaran ada persoalan dalam proses lelang. Maka itu, dia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan fatwa perihal lelang ERP.

"Kami masih tunggu fatwa Kejaksaan Agung. Kira-kira *ya* kalau enggak ada masalah, mengundurkan diri enggak? Karena itu, saya bilang begitu, nanti lihat prosesnya harus cek ke kejaksaan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, keputusan lelang ERP merupakan keputusan besar yang tata kelolanya harus benar. Jangan sampai di kemudian hari Pemprov DKI yang bermasalah. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu enggan berkomentar lebih jauh bagaimana nasib lelang ERP yang sudah mengerucut ke satu perusahaan setelah dua perusahaan lainnya mundur.

Daripada ERP, Anies lebih memprioritaskan bagaimana moda transportasi massal menjangkau seluruh wilayah permukiman dan saling terintegrasi demi mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Kami lebih penting membangun transportasi umum. Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan Pemprov DKI," ungkapnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan, saat ini instansinya telah mengirimkan semua dokumen terkait perencanaan ke Kejaksaan Agung dan informasinya sedang dikaji atau ditelaah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

Dia berharap *legal opinion* yang diberikan kejaksaan bisa menjadi referensi yang baik untuk pelaksanaan lelang. Usulan *legal opinion* agar kebijakan ERP memiliki keberhasilan yang tinggi dan ketika diterapkan secara risiko tidak menemui kegagalan.

Menurut Sigit, keandalan sistem menjadi kunci penerapan dan semuanya *fairness* sesuai ketentuan. "Sehingga yang penting bagi kami bagaimana *requirement output* kinerja dari sistem pembayaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya," ujarnya.

Menanggapi mundurnya dua perusahaan peserta lelang, kata dia, dua perusahaan tersebut bukan mengundurkan diri, melainkan mengubah komposisi konsorsium. Artinya, bila salah satu penyedia yang tergabung dalam konsorsium itu mundur dapat digantikan anggota baru.

"Kami juga konsultasi apa yang jadi *restricted*. Salah satu anggota konsorsium mengundurkan diri diganti *member* baru. Itu lagi berproses. Jadi saat ini masih tiga peserta, kami belum memutuskan. Mereka mengubah komposisi konsorsium perusahaan, bukan mundur sepenuhnya," kilahnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan sikap Anies yang tidak memprioritaskan ERP, padahal ERP merupakan muara dari ada moda transportasi massal *mass rapid transit* (MRT), *light rail transit* (LRT), serta *bus rapid transit* (BRT) sehingga masyarakat khususnya pengendara pribadi memilih menggunakan angkutan umum ketika sudah diterapkan ERP.

"Sekarang mau benahi transportasi umum *gimana* ? Coba *hilangin* Kopaja jelek kasarnya *kan* pasti berontak, tapi dengan penyekatan di situ semua negara maju pakai *kok*. Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga pakai (ERP). Apakita mundur lagi 20 tahun?" ungkapnya.

Politikus PDIP itu akan mempertanyakan kepada Anies perihal ERP. Menurut dia, ERP merupakan sistem pengendalian lalu lintas paling efektif daripada ganjil-genap yang diawasi secara manual. "Ini *kan* program bagus. Jadi orang masuk ke situ langsung bayar pajak. Kalau transportasi umum baik, pasti naik itu *kok*. Saya pun akan naik transportasi umum," kata Pras.

Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto pesimistis ERP dapat terealisasi di Jakarta sebab hampir lima tahun proses ERP masih berkutik di lelang, padahal uji coba telah dilakukan.

"Lelang *open technology* mempersulit proses penentuan pemenang lelang. Satu-satunya teknologi yang digunakan ERP adalah DSRC. Teknologi lain itu baru dilakukan di jalan tol yang jelas berbeda dengan ERP. Bisa-bisa menjadi kelinci percobaan," ucapnya.

Penerapan ERP juga tidak cukup hanya membangun infrastrukturnya. Pemprov DKI harus mempercepat pengintegrasian basis data kendaraan bermotor dengan kepolisian. Dengan begitu, kepemilikan kendaraan jelas dan fungsi ERP berjalan maksimal. "Salah satu pendukung operasional ERP semua kendaraan harus sesuai data kepemilikan. Ini saja belum ada progresnya," ungkapnya.

• bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Nasib Lelang ERP Tunggu Kejaksaan

TERANCAM BATAL

Sistem jalan berbayar secara elektronik atau *electronic road pricing* (ERP) terancam batal. Penyebabnya dua dari tiga perusahaan yang mengikuti lelang mengundurkan diri.

SIMULASI ERP

Jadwal: November 2018

Lokasi: Jalan Medan Merdeka Barat

Uji coba: 205 kendaraan

Tujuan: Mengetahui kapasitas dan kemampuan sistem ERP untuk diaplikasikan di jalanan Jakarta

KORANSINDO

Tiga perusahaan yang ikut lelang

- Q-Free (perusahaan teknologi asal Norwegia)
- Kapsch (perusahaan teknologi asal Swedia)
- Bali Tower

LELANG DIDUGA BERMASALAH

- Dua perusahaan Q-Free dan Kapsch yang pernah menguji coba perangkat ERP pada 2014 di ruas Jalan Sudirman dan Kuningan, Jakarta Selatan tiba-tiba mengundurkan diri.
- Namun, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menegaskan, dua perusahaan tersebut bukan mengundurkan diri, melainkan mengubah komposisi konsorsium. Apabila salah satu penyedia yang tergabung dalam konsorsium mundur, dapat digantikan anggota baru.
- Menanggapi mundurnya dua perusahaan tersebut, Dishub telah mengirimkan semua dokumen terkait perencanaan ke Kejaksaan Agung yang diharapkan ada legal opinion sehingga bisa menjadi referensi yang baik untuk pelaksanaan lelang.

"Ini program bagus. Jadi orang masuk ke situ langsung bayar pajak. Kalau transportasi umum baik pasti naik itu kok. Saya pun akan naik transportasi umum."

PRASETIO EDI MARSUDI
Ketua DPRD DKI Jakarta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Nasib Lelang ERP Tunggu Kejaksaan

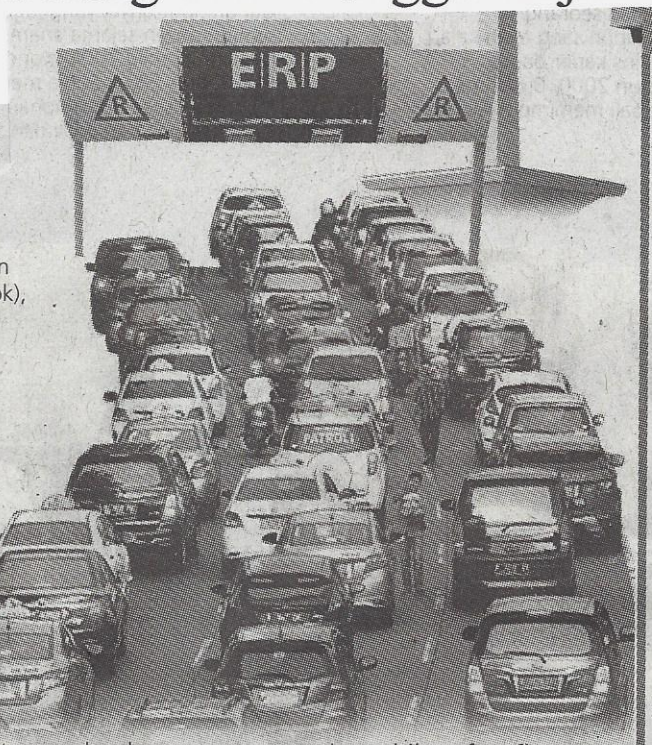

PERJALANAN ERP

2012

Program ERP telah direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat itu.

2014

- Uji coba dilakukan dengan menggunakan standar internasional yang dipakai banyak negara maju.
- Alat yang dipakai antara lain DSRC 5,8 Ghz atau komunikasi jarak pendek, *one piece on board* unit (OBU) yang digunakan sebagai identitas elektronik untuk media pembayaran terkoneksi kepada akun pada sistem pusat, kamera ANPR yang dapat mendeteksi atau mengenali pelat nomor kendaraan secara otomatis, *multilane free flow* yang dapat mendeteksi kendaraan multijalur tanpa perlu berhenti pada waktu proses pemungutan tarif.

Sumber: Dishub DKI Jakartadiolah dari berbagai sumber

2015

- Ahok yang menjabat gubernur meminta ERP segera diterapkan. Lelang ERP melalui lelang investasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dinilai terlalu lama dan akhirnya lelang dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ERP.
- Setelah dipelajari Pemprov DKI akan merugi bila lelang investasi dilakukan. Sebab, di dalamnya mengatur kerja sama yang intinya perusahaan swasta dapat membangun dan mengoperasikannya selama 8-10 tahun. Padahal, dalam dua tahun modal investasi pembangunan ERP sebesar Rp2,8 triliun sudah bisa balik modal.
- BLUD ERP memilih lelang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan swasta yang memenangkan lelang akan ditayangkan di *e-catalogue* dan Pemprov DKI siap bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

2016

Lelang dilakukan pada Juli

2017

- Awal tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempermasalahkan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau ERP yang hanya memuat penggunaan teknologi DSRC.
- Revisi Pergub No 149 Tahun 2016 dilakukan dengan menghilangkan kalimat teknologi DSRC sehingga lelang yang sudah berjalan dengan DSRC sejak pertengahan tahun lalu terpaksa kembali diulang dengan menampung semua teknologi yang dipakai dalam ERP.
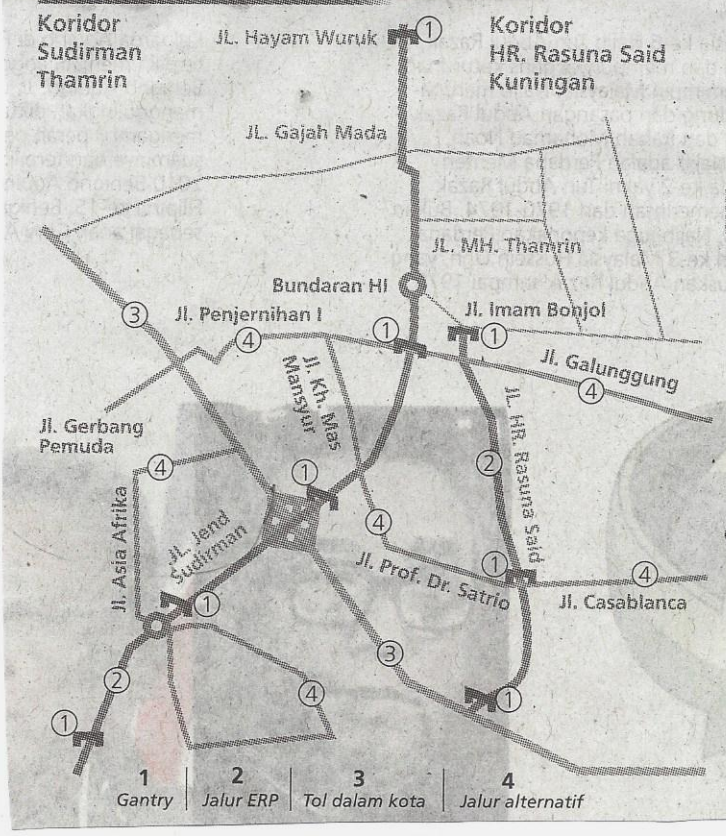
RENCANA LOKASI ERP